



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 267 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/218/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Tabalong Nomor B-124/BKPSDM/MPKA/800.1.3.1/VII/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Puluh Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/218/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/218/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Sembilan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/218/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2025, diubah sebagai berikut:


- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 39 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 39 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABIDKABAG	
KASIKASUBBIDIK/SUBEAG/JP	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABIDKABAG	

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGELOLA	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	H. HASBI, S.Pd, M.Pd NIP. 19680214 198804 1 002 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD RAHMADI NIP.19821104 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	--	
2	Dinas Kesehatan	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Plt. Kepala Dinas Kesehatan	RISKA NOVITA SARI, A.Md.Kep NIP.19931121 201903 2 019 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	--	
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	SETYAWAN ANDRI WIBOWO, S.Farm.Apt NIP.19871018 201402 1 003 Plt. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	DAH PUSPITA SARY, A.Md NIP.19860813 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	--	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMADI, A.Md.Ak NIP.19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	--	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST NIP.19710928 200003 1 003 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DZAKY HASNI PUTERA, ST NIP.19960621 202012 1 010 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	--	
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	RAJA RAFIF RAHDI, A.Md.Tra NIP. 20010709 202403 1 001 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	--	
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 2 002 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	--	
8	Dinas Lingkungan Hidup	H. SLAMET RIYADI, ST NIP.19670815 199603 1 004 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ANA DILYANTI, A.Md NIP.19810122 201001 2 014 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	--	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NORAINAH, S.AP NIP.19710219 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--	

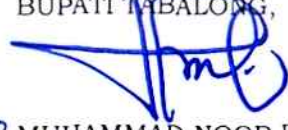
1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	AHMAD RIPANI, S.Ak NIP.19820814 200901 1 012 Staf Fungsional Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	..-	
11	Dinas Sosial	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP.19651219 199603 1 001 Plt. Kepala Dinas Sosial	FADILLAH NIP.19770816 200701 1 017 Staf Fungsional Dinas Sosial	..-	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MUHAMMAD RASYID, S.Sos, MH NIP.19700305 199002 1 001 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKA SARTIKA, S.AP NIP. 19760804 201001 2 012 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	..-	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	YUSIE INDRIANI, S.Ak NIP.19870712 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	..-	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. H. ARBUANSYAH, MA NIP.19730207 199311 1 003 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	AULIA RAHMAN NIP. 19830211 201212 1 003 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	..-	
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Drs. H. TAZERIYANOR, MA NIP.19671104 198903 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DEWI HAYATI, SE NIP. 19890227 202012 2 007 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	..-	
16	Sekretariat Daerah	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	WILDA AFRIANI, A.Md.Ak NIP.19800409 200801 2 027 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	..-	
17	Sekretariat DPRD	Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Sekretaris DPRD	YASIR RAHMAN NIP.19790607 200701 1 011 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	..-	
18	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatan Daerah	FAHRURAZI, A.Md.Ak NIP. 19801010 201001 1 025 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah	..-	
19	Inspektorat Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Hj. NORLIANA NIP. 19690512 200604 2 014 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	..-	
20	Kecamatan Tanjung	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, M.A. NIP.19880526 200701 1 001 Camat Tanjung	KIKI ERY YOLANDA, A.Md.Farm NIP.19860226 200501 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	..-	
21	Kecamatan Murung Pudak	HANDI YANUARDI, S.IP, M.A. NIP.19880113 200701 1 001 Camat Murung Pudak	IPNAWATI, S.Sos.I NIP. 19820331 201101 2 003 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	..-	

1	2	3	4	5	6
34	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	FAHRUL RAJI, S.Pi., M.AP. NIP.19691111 199703 1 006 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	SOFYAN HADI NIP. 19780914 199703 1 003 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAHMAT MUHAYAT, A.Md NIP. 19880807 202203 1 002 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. HALISAH, S.AP NIP.19810419 200801 2 012 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan	SOLEH, SP. NIP. 19700217 199503 1 002 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	NOR FAJERIATI, A.Md.Ak NIP.19811128 200801 2 019 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	--	
38	Dinas Tenaga Kerja	HADY ISMANTO, S.Sos, M.AP NIP. 19760717 199511 1 001 Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja	SYAIKHU AKRAMUDDIN, A.Md NIP.19740702 200501 1 003 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	--	
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	EDDY SURIYANI, S.Sos, MA NIP. 19741223 199403 1 004 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	ARLINA KARTIKASARI, A.Md NIP.19850112 201903 2 010 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	--	
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	H. SYAM'ANI, SP, MP NIP.19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	MUHAMMAD SYAFIE NIP. 19720101 200701 1 040 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	--	
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HARIS FAKHROZI, ST, MT NIP.19721024 200501 1 004 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	LINDA SETIA BUDI, SM NIP.19980614 202012 2 007 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBIDIR/SUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,

  
 e MUHAMMAD NOOR RIFANI